



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan A. Yani Km. 37,5 No 119. Kel.Sungai Paring, Martapura 70613 Kalimantan Selatan
Tlp (0511) 7218166 Fax (0511) 4772335

<http://disnaker.banjarkab.go.id/E> - mail nakertrans.banjar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANJAR
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANJAR

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANJAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar tentang Indikator Kinerja Utama yang menjadi pedoman untuk penyusunan Program Kegiatan dan acuan ukuran kinerja atau akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undnag-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Presiden tahun 2020 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Konsideran Pedoman Penetapan Indikator Kinerja untuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KETIGA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Bidang dan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Martapura

Pada Tanggal : 8 Mei 2023



Hj. ST Mahmudah, SH.MH

Pembina Utama Muda

NIP : 19751108 199903 2 005

Lampiran :
 No : No. 17 Tahun 2023
 Tanggal : 8 Mei 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANJAR**

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME),KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	DIFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB
Terfasilitasinya Penyediaan Lapangan Kerja Baru	Tingkat Kesempatan Kerja	Kesempatan kerja maksudnya peluang seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja untuk bisa terserap dalam pasar kerja atau dapat bekerja, semakin besar angka TKK, semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sama dengan jumlah penduduk yang bekerja dibagi angkatan kerja ($TKK = a / b \times 100\%$) keterangan : a = Jumlah penduduk Bekerja b = Jumlah Angkatan Kerja Untuk jumlah penduduk yang bekerja dan jumlah angkatan kerja merujuk pada data statistik tahun terakhir.	Kepala Dinas
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga kerja	Tingkat produktivitas Tenaga kerja maksudnya untuk mengetahui besaran upah perjam tenaga kerja Kabupaten Banjar, adapun sebagai dasar perhitungan adalah PDRB Harga Konstan tahun berjalan / Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Banjar / Jumlah jam kerja 1 tahun = 1920 jam (1 hari 8 Jam X 4 Minggu X 12 Bulan) Adapun jumlah PDRB sebesar; Rp. 11.736.080.000.000 , dan jumlah Tenaga Kerja adalah 306.060 orang	(PDRB Harga Konstan : Jumlah Tenaga Kerja : Jumlah jam Kerja 1 tahun)	Kabid Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
Meningkatnya kualitas tenaga kerja berdasarkan klaster kompetensi / Non Kompetensi	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki sertifikat pelatihan / kompetensi	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/kompetensi adalah jumlah Lulusan yang bersertifikat pelatihan atau bersertifikat kompetensi jumlah Lulusan yang bersertifikat pelatihan maksudnya adalah peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan secara tertib, jumlah Lulusan yang bersertifikat kompetensi maksudnya adalah peserta pelatihan yang mengikuti uji kompetensi	jumlah Peserta Yang Dilatih Pada Tahun N dibagi Jumlah Angka Pengangguran pada Tahun N dikali 100% jumlah yang Dilatih dibagi Angka Pengangguran dikali 100% (64 : 12.317 X 100% = 0.52%)	Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja

Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada thun N	Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada thun N	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada thun N	Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
Terlaksana Koordinasi Lintas Lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan Instruktur serta sarana dan pra sarana dan Prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah kesepakatan atau koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan pra sarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n.	Jumlah Kesepakatan maksudnya adalah nakertran melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan dalam hal instruktur	Jumlah kesepakatan atau koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan pra sarana pelatihan	Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
Terbangunnya Gedung BLK	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Penyusunan DED BLK dan Pembangunan Gedung Balai latihan Kerja	1 Unit	Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
Meningkatnya Kualitas LPK	Persentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta.	(Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina pada tahun n / Jumlah seluruh LPK pada tahun n) X 100%	Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta.	(Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina pada tahun n / Jumlah seluruh LPK pada tahun n) X 100%	Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Lembaga Pelatihan kerja merupakan institusi penyelenggaraan Pelatihan Kerja yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pelatihan kerja	Jumlah Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja	Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Lembaga Pelatihan kerja merupakan institusi penyelenggaraan Pelatihan Kerja yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pelatihan kerja	Jumlah Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja	Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
Meningkatnya Partisipasi / Dukungan Perusahaan terhadap Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas	Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas maksudnya adalah perusahaan yang bekerjasama dalam pemagangan tenaga kerja atau perusahaan yang memberikan Bimtek/Diklat kepada karyawannya . jumlah perusahaan pada posisi tahun 2020 yang melaporkan ke disnakertran berjumlah 389 perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas n / jumlah perusahaan yang wajib lapor tahun n X 100%	Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja

Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas maksudnya adalah perusahaan yang bekerjasama dalam pemagangan tenaga kerja atau perusahaan yang memberikan Bimtek/Diklat kepada karyawannya . jumlah perusahaan pada posisi tahun 2020 yang melaporkan ke disnakertran berjumlah 389 perusahaan	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Kasi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
Peningkatan Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota, dan tenaga kerja mandiri atau berwirausaha baru, serta tenaga kerja yg bekerja pada instansi pemerintah,BUMN,BUMD, Perusahaan.	(Jumlah pencari kerja (pencari kerja) yang di tempatkan/jumlah pencari yang terdaftar X 100%)	Kabid Penempatan Tenaga Kerja
Meningkatnya Pelayanan antarkerja di daerah kabupaten	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten Banjar	lowongan kerja atau disebut kesempatan kerja yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja untuk para pencari kerja dan memberikan peluang bagi angkatan kerja untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai sumber daya ekonomi dalam proses produksi untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya.	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten Banjar	Kasi Penempatan Tenaga Kerja
Tersedianya SDM Pelayanan antar kerja (Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain	ASN / Tenaga Kontrak yang mengikuti pelatihan melalui Bimtek	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain lain untuk Peningkatan Kompetensi	Kasi Penempatan Tenaga Kerja
Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan pada kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pembei kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan	Kasi Penempatan Tenaga Kerja
Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan penyuluhan bimbingan jabatan	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan adalah suatu proses untuk membantu seseorang dalam memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pemilihan pekerjaan atau jabatan, dengan tujuan untuk mempertemukan antara karakteristik individu dengan peluang / kesempatan kerja yang ada, penyuluhan bimbingan jabatan diberikan kepada siswa SMU/SMK yang akan memasuki dunia kerja.	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan penyuluhan bimbingan jabatan	Kasi Penempatan Tenaga Kerja
Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	Disabilitas yang ada di Kabupaten Banjar yang mendapatkan pelayanan ketenagakerjaan, adapun jumlah disabilitas sebanyak 804 orang.	Jumlah disabilitas yang mendapatkan pelayanan ketenagakerjaan pada tahun N / jumlah disabilitas seluruhnya pada tahun N X 100%	Kasi Penempatan Tenaga Kerja
Terwujudnya perluasan kesempatan kerja.	Jumlah Tenaga Kerja yang diperdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	Perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru /atau mngembangkan lapangan pekerjaan yang sudah ada, melalui kewirausahaan dengan cara pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri dan sistem padat kerja serta penerapan Teknologi Tepat Guna.	Jumlah Tenaga Kerja yang diperdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	Kasi Penempatan Tenaga Kerja

Meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi melalui bursa tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar	Pencari kerja yang mendaftar AK 1	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar pad AK1	Kasi Penempatan Tenaga Kerja
Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online adalah melalui Website Banjarkerja, Facebook,Instagram, dan whatsapp	Jumlah Aplikasi	Kasi Penempatan Tenaga Kerja
Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online karir hub	Karir Hub adalah Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online yang dikembangkan oleh Kemnaker RI dan juga menggunakan website banjarkerja,	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar	Kasi Penempatan Tenaga Kerja
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja baik melalui Job fair maupun Bursa Kerja Khusus (BKK)	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kasi Penempatan Tenaga Kerja
Meningkatnya Perlindungan terhadap PMI (Pra dan Purna)	Persentase PMI (Pra dan Purna) yang diberikan fasilitasi Perlindungan	diberikan perlindungan berupa, bekal pengetahuan terkait syarat-syarat bekerja di luar negeri serta terhadap PMI yang mengalami masalah di tempat pekerjaannya.	Jumlah PMI (Pra dan Purna) yang diberikan fasilitasi Perlindungan tahun n dibagi jumlah PMI (Pra dan Purna) yang terdata tahun n	Kasi Penempatan Tenaga Kerja
Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	CPMI/CTKI adalah Calaon Pekerja Migran Indonesia atau calon Tenaga kerja Indonesia yang memahami persyaratan bekerja ke Luar Negeri dan perlindungan kepada CPMI maupun PMI,yang bertujuan untuk menekan/mengurangi jumlah PMI yang bekerja secara Non Prosudural.	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Kasi Penempatan Tenaga Kerja
Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	PMI/ TKI purna dan keluarga yang dilatih	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Kasi Penempatan Tenaga Kerja
Persentase Pengesahan RPTKA Perpanjangan Bagi TKA yang Bekerja Dilokasi dalam 1 (satu) Kabupaten	Persentase TKA yang diberikan fasilitasi perpanjangan IMTA	Jumlah TKA yang diberikan fasilitasi perpanjangan IMTA dibagi TKA yang mengusulkan perpanjangan IMTA	Jumlah TKA yang diberikan fasilitasi perpanjangan IMTA dibagi TKA yang mengusulkan perpanjangan IMTA	Kasi Penempatan Tenaga Kerja
Laporan Koordinasi	Persentase Perusahaan yang memperkerjakan TKA	Jumlah Perusahaan yang memperkerjakan TKA / Jumlah Perusahaan keseluruhan	0,5% Thn 2020	Kasi Penempatan Tenaga Kerja
Hubungan Industrial yang Harmonis	*Persentase perusahaaa yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, PKWT,Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan	PP adalah Peraturan perusahaan yang dibuat oleh perusahaan , sedangkan PKB adalah perusahaan yang membuat perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) atau beberapa SP/SB yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak .Struktur upah adalah Struktur upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai yang tertinggiatau dari	(Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / Jumlah perusahaan x 100%)	Kabid Hubungan Industrial

		yang tertinggi sampai yang terendah, Skla Upah adalah kisaran nilai nominal upah untuk setiap kelompok jabatan .		
Meningkatnya kepatuhan Perusahaan terhadap aturan Undang Undang Ketenagakerjaan dan Undang undang Cipta Kerja	Persentase Peraturan perusahaan aktif yang disahkan	Jumlah Perusahaan yang aktif mensahkan peraturan perusahaannya	Jumlah Perusahaan yang aktif mensahkan Peraturan Perusahaannya/jumlah perusahaan x 100%	Kasi Syarat Kerja dan Jaminn Sosisl
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online	Jumlah perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan	Kasi Syarat Kerja dan Jaminn Sosisl
Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mempunyai Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Perusahaan yang mempunyai Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Perusahaan yang mempunyai Perjanjian Kerja Bersama	Kasi Syarat Kerja dan Jaminn Sosisl
Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan)	Data dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (Jumlah perusahaan yang memahami syarat kerja dalam hubungan kerja (PKWT aktif) dan Jumlah perusahaan yang memiliki PP/PKB dan yang menjadi anggota kepesertaan BPJS	Data dan Informasi Sarana Hubungan Industrial	Kasi Syarat Kerja dan Jaminn Sosisl
Tersedianya Fasilitasi penyelesaian kasus industrial	Persentase Pelaksanaan Sarana Hubungan Industrial (PKWT,LKS Bipartit,Serikat Pekerja/Buruh,Organisasi Pengusaha, dan Pekerja yang mendapatkan fasilitas Jamsostek)	Sarana Hubungan Industrial adalah segala sesuatu/wadah yang dipakai sebagai alat penyelesaian'Perselisihan Hubungan Industrial, untuk mencapai hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja harmonis, kondusif dan berkeadilan.	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang Jumlah LKS Bipartit, Jumlah serikat pekerja, Jumlah organisasi pengusaha, jumlah lks Tripartit, jumlah pekerja yang mendapatkan fasilitas jamsostek/ Jumlah Perusahaan x 100%	Kasi Hubungan Industrial
Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat /Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah aten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Perselisihan yang dapat dicegah jika perusahaan mencatatkan Perjanjian Kerja Antar Waktu (PKWT) sesuai peraturan yang berlaku	Jumlah Perusahaan yang mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	Kasi Hubungan Industrial

Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah bupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang diselesaikan	Perselisihan dapat diselesaikan melalui LKS Bipartit (lembaga yang terdiri perwakilan pekerja dan pengusaha yang ada diperusahaan) jika tidak dapat terselesaikan maka dilakukan mediasi oleh mediator	Jumlah kasus yang terselesaikan	Kasi Hubungan Industrial
Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja /Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	Setiap Pengusaha berhak membentuk menjadi anggota pengusaha, dan setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	Kasi Hubungan Industrial
terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Gabungan antara Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja yang memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakandan pemecahan masalah ketenagakerjaan	Lembaga Kerjasama Tripartit yang terbentuk	Kasi Hubungan Industrial
Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, kematian, jaminan Hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan	Jumlah Pekerja yang mendapatkan fasilitas Jamsostek	Kasi Hubungan Industrial
Terciptanya keselarasan dalam perencanaan tenaga kerja	*Persentase dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun	1 Dokumen	dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun	Kasi Perencanaan Tenaga Kerja
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro/ Mikro	Dokumen perencanaan tenaga kerja untuk jangka menengah	Jumlah Dokumen yang di susun	Kasi Perencanaan Tenaga Kerja
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen perencanaan tenaga kerja untuk jagka menengah	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kasi Perencanaan Tenaga Kerja
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Kabupaten/Kota dalam Penyusunan RTK Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Badan usaha yang membuat dokumen perencanaan tenaga kerja	Jumlah Badan Usaha yang membuat dokumen perencanaan tenaga kerja	Kasi Perencanaan Tenaga Kerja

Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks kepatuhan dan kinerja intern Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nilai Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Semakin Tinggi, Memebrikan Gambaran Kinerja dan Mutu Pelayanan ayng Lebih Baik	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>>90 – 100</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>>80 – 90</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>>70 – 80</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>>60 – 70</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td><60</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Nilai	Interpretasi	A	>90 – 100	Memuaskan	BB	>80 – 90	Sangat Baik	B	>70 – 80	Baik	CC	>60 – 70	Cukup	C	<60	Kurang	Sekretaris
			Kategori	Nilai	Interpretasi																	
			A	>90 – 100	Memuaskan																	
			BB	>80 – 90	Sangat Baik																	
			B	>70 – 80	Baik																	
			CC	>60 – 70	Cukup																	
C	<60	Kurang																				
Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Inntern = $\Sigma (\text{Unsur Kinera Utama} \times 40\%) + (\text{Unsur Kepatuha} \times 30\%) + (\text{Unsur Pelayanan Umum} \times 30\%)$																						
Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu		Kasubbag Perencanaan																		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kasubbag Perencanaan																		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kasubbag Perencanaan																		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kasubbag Perencanaan																		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kasubbag Perencanaan																		

Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kasubbag Perencanaan
tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kasubbag Perencanaan
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubbag Perencanaan
Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	dokumen keuangan perangkat daerah tepat waktu dan tepat mutu	100%	Kasubbag Keuangan dan Aset Daerah
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kasubbag Keuangan dan Aset Daerah
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kasubbag Keuangan dan Aset Daerah
Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kasubbag Keuangan dan Aset Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Dokumen Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Kasubbag Keuangan dan Aset Daerah
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kasubbag Keuangan dan Aset Daerah

Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Kasubbag Keuangan dan Aset Daerah
Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Adminirtrasi Kepegawian Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhinya	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Terseleenggaranya kegiatan kantor	Persentase penyelenggaraan penunjang administrasi umum perkantoran	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	peralatan rumah tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	Sarana dan prasarana kantor yang disediakan	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	PersentaseBarang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Jasa Penunjang Pelayanan yang terpenuhi	Persentase Jasa penunjang pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Terfasilitasinya penguatan Infrastruktur, Ekonomi dan SDM di kawasan Ex. Transmigrasi	Persentase Kawasan Ex.Transmigrasi Yang berkembang	Kawasan Ex. Transmigrasi yang berkembang maksudnya adalah desa yg memiliki sumber daya dan ekonomi serta kemampuan mengelola kehidupan ekonominya untuk kesejahteraan masyarakat Ex. kawasan Transmigrasi , kualitas ekonomi ex. Transmigrasi , Adapun parameter desa yang berkembang terdapat lebih dari 1 jenis kegiatan ekonomi penduduk. yang terdapat pada indeks desa membangun dalam lingkup ketahanan ekonomi .Jumlah desa ex. transmigrasi berjumlah 19 UPT adalah sebagai berikut : Kec. Sungai Pinang :1. Kahelaan, 2. Rantau bakula, 3. Rantau angka. 4. Sumber baru, 5. Sumber harapan, 6.Belimbing lama, 7.Belimbing Baru. 8. Hakim Makmur ,: Kec. Simpang Empat : 1. Galam Rabah I, 2. Galam Rabah II, 3. Galam Rabah III, 4. Galam Rabah IV, 5. Galam Rabah 5, 6. Belanti II , 7. Cintapuri , : Kec. Sungai Tabuk : 1. Riam kanan I : Kec. Aluh-aluh: 1. Tambak Padi, : Kec. Paramasan : 1. Angkipih : Kec. Martapura : 1. Riam Kanan II	Jumlah kawasan ex. Transmigrasi yang memiliki keragaman produksi / Jumlah kawasan ex,transmigrasi keseluruhan x 100%	Kepala Dinas

	Persentase Pengembangan kawasan Ex. Transmigrasi	Kawasan Ex. Transmigrasi yang berkembang maksudnya adalah desa yg memiliki sumber daya dan ekonomi serta kemampuan mengelolanya kehidupan ekonominya untuk kesejahteraan masyarakat Ex. kawasan Transmigrasi , kualitas ekonomi ex. Transmigrasi , Adapun parameter desa yang berkembang terdapat lebih dari 1 jenis kegiatan ekonomi penduduk. yang terdapat pada indeks desa membangun dalam lingkup ketahanan ekonomi .Jumlah desa ex. transmigrasi berjumlah 19 UPT	Jumlah kawasan ex. Transmigrasi yang berkembang / Jumlah kawasan ex,transmigrasi keseluruhan x 100%	Kabid pelatihan Kerja dan Produksi Tenaga Kerja
	Jumlah Pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian	Kawasan Ex. Transmigrasi yang berkembang maksudnya adalah desa yg memiliki sumber daya dan ekonomi serta kemampuan mengelolanya kehidupan ekonominya untuk kesejahteraan masyarakat Ex. kawasan Transmigrasi , kualitas ekonomi ex. Transmigrasi , Adapun parameter desa yang berkembang terdapat lebih dari 1 jenis kegiatan ekonomi penduduk. yang terdapat pada indeks desa membangun dalam lingkup ketahanan ekonomi .Jumlah desa ex. transmigrasi berjumlah 19 UPT	Jumlah Pengembangan kawasan ex. Transmigrasi / Jumlah kawasan ex,transmigrasi keseluruhan x 100%	Kasi Transmigrasi
Terwujudnya Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Pemantapan Satuan Pemukiman Terwujudnya Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina	Kasi Transmigrasi
Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Wilayah Ex.Transmigrasi yang terfasilitasi penguatan infrastruktur sosial , ekonomi	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Kasi Transmigrasi

Ditetapkan di : Martapura
Pada Tanggal : 8 Mei 2023



Hj. ST Mahmudah, SH.MH

Pembina Utama Muda

NIP : 19751108 199903 2 005

